



## Pendidikan dan Kesehatan Rawan Korupsi

**YOGYA, TRIBUN** - Mencegah tindak pidana korupsi di sektor pendidikan dan kesehatan, Selasa (7/4) tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI menggelar sosialisasi kepada beberapa jajaran staf Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta.

Direktur Penelitian dan Pengembangan (Litbang) KPK Roni Dwi Susanto menuturkan sosialisasi tersebut merupakan rangkaian dari program KPK yang dinamakan *national interest* untuk

memberikan perhatian pada sektor-sektor yang strategis dan rawan menjadi sasaran tindak korupsi.

"Sektor pendidikan ini cukup strategis karena mendapat dana sekitar RP4,9 triliun. Dan efeknya langsung ke masyarakat, sehingga jika sektor ini dikorupsi yang dirugikan sangat banyak," kata Roni, Selasa (7/4).

Jika dilihat di Yogyakarta, lanjut Roni, masih banyak bangunan sekolah yang tidak layak, padahal sudah ada dana yang dise-

diakan untuk merehnovasi sekolah-sekolah tidak layak tersebut. Selain itu, modus lain yang sering digunakan sebagai celah korupsi adalah pengadaan sarana dan prasarana sekolah yang kadang dimanipulasi.

"Beberapa temuan KPK yang lain adalah di sektor pendidikan juga sering ditunggangi kepentingan politik. Misalnya ada partai politik tertentu yang memberikan bantuan kepada siswa miskin, tapi dengan embel-embel untuk memilih

mereka saat pemilihan," papar Roni.

Sementara di bidang kesehatan, Roni menegaskan, adanya dana BPJS Kesehatan sekitar Rp19,1 triliun harus benar-benar dikawal. Ia menambahkan bantuan dana BPJS harus bisa diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan.

"Saat ini di Indonesia, kalau orang sakit berobat bukannya malah sembuh tapi tambah sakit. Karena

■ Bersambung ke Hal 14

## Pendidikan dan

biaya yang sangat tinggi di rumah sakit," kata dia.

Pencegahan, lanjutnya, sangat penting dilakukan. Namun jika tidak bisa dicegah, maka KPK akan segera mengambil tindakan tanpa memberi toleransi waktu ketika semua bukti

sudah terkumpul.

Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta Titik Sulastris menambahkan, sektor pendidikan dan kesehatan merupakan dua sektor yang berpengaruh pada hajat hidup orang banyak dan menjadi faktor penentu keberhasilan negara.

"Oleh karena itu, pencegahan korupsi di dua sektor tersebut harus dilakukan agar tidak mengganggu pelayanan publik. Aparat pemerintah juga perlu membekali diri untuk menghindari tindak korupsi," tutupnya. (tiq)

Sambungan Hal. 13

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pendidikan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Kesehatan			

Yogyakarta, 16 Juni 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005